



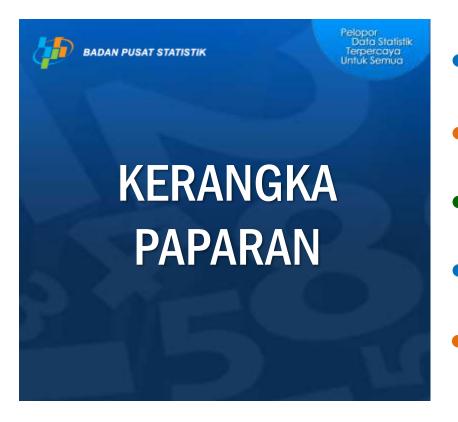
# Focus Group Discussion

Badan Pusat Statistik dengan Komisi XI DPR RI

Jakarta, 4 Oktober 2016







Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPS

Upaya Mewujudkan Satu Data

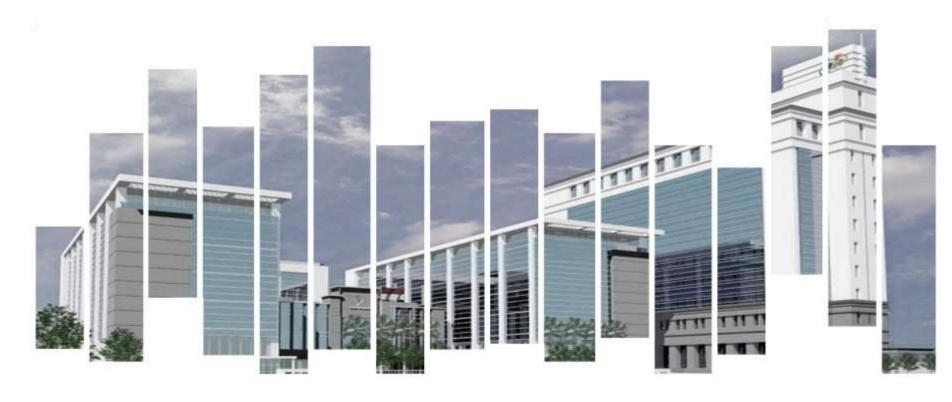
Upaya Meningkatkan Kualitas Data

Upaya Pelayanan Publik

Tantangan BPS



# Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPS



# KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPS (Peraturan Presiden RI Nomor 86 TAHUN 2007)

- □ Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1).
- ☐ BPS secara khusus memiliki fungsi penting sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan statistik seperti sensus atau survei-survei nasional
- □ Sebagai lembaga non-kementerian, kedudukan BPS terhadap lembaga pemerintah atau kementerian lain adalah independen. Kondisi tersebut menjadikan BPS dapat berperan sebagai *check and control* semua angka statistik lembaga pemerintah.







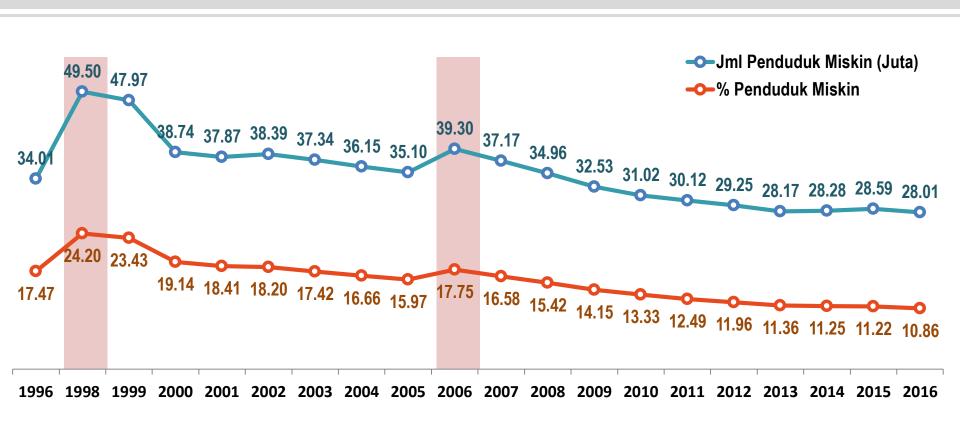






## **BPS INDEPENDEN**

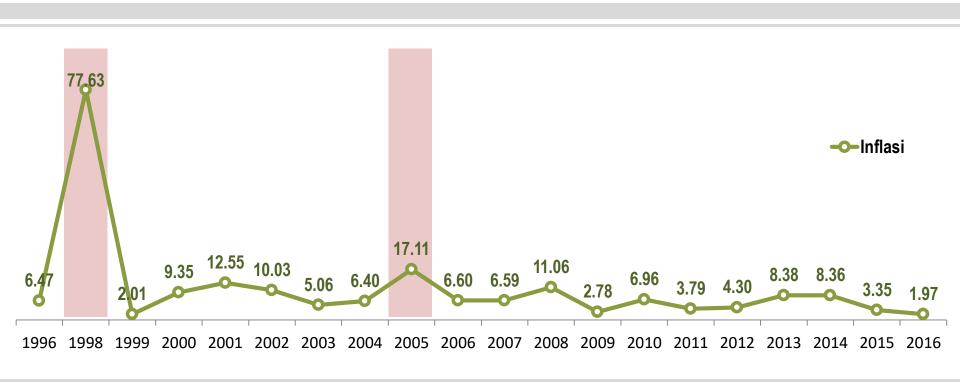
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin 1996-2016





## **BPS INDEPENDEN**

## Perkembangan Inflasi Tahunan 1996-2016



#### **Output BPS Dimonitor Banyak Pihak**



#### Forum Masyarakat Statistik, UU No 16 Tahun 1997 Pasal 29:

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan.
- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.



#### Lembaga internasional

dilaporkan di sidang Tahunan Komisi Statistik PBB



Masyarakat

## Kegiatan BPS





# Upaya Mewujudkan Satu Data

BPS Berkolaborasi dengan KSP dan Bappenas, Menggandeng Seluruh K/L





## 3 JENIS STATISTIK



#### **UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5**

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- Statistik Dasar
  - -- dikumpulkan BPS
- Statistik Sektoral
  - -- dikumpulkan instansi
- ☐ Statistik Khusus
  - --- dikumpulkan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

#### Rambu-Rambu Menuju Satu Data Indonesia

- ✓ Pembagian yang Jelas Antara Statistik Dasar, Sektoral, Khusus
- ✓ Pembakuan Kondef, Metodologi, Klasifikasi
- ✓ Mekanisme Pertukaran Data



## PENGERTIAN SATU DATA

Satu Data





Prinsip-prinsip
dasar untuk
mengelola dan
menyelenggarakan
data yang akuntabel
dan berintegritas

**TERBENTUK** 



Statistik Resmi / Official Statistics

Jenis Statistik: Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus

#### **Satu Standar Data**

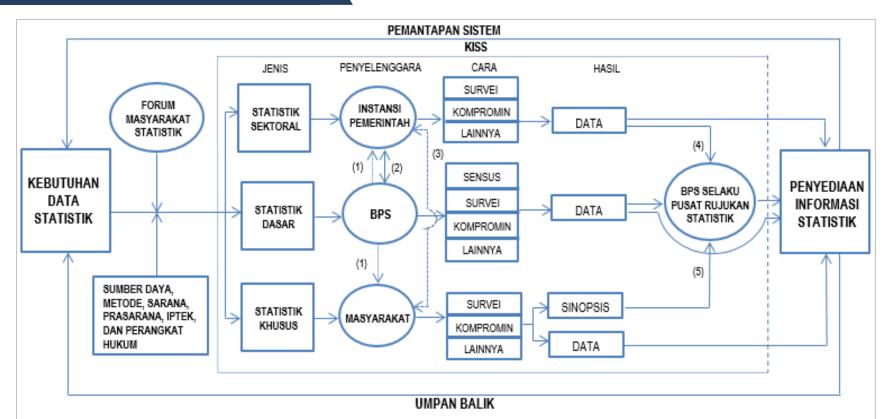
- ✓ instrumen,
- satuan,
- ✓ pertukaran,
- konsep
- √ klasifikasi
- definisi

Satu Metadata Baku

#### **Satu Portal Data**

- √ diseminasi dan rilis data,
- √ akses mudah bagi semua,
- ✓ partisipasi publik

#### SISTEM STATISTIK NASIONAL



#### KETERANGAN:

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

(1) : BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik

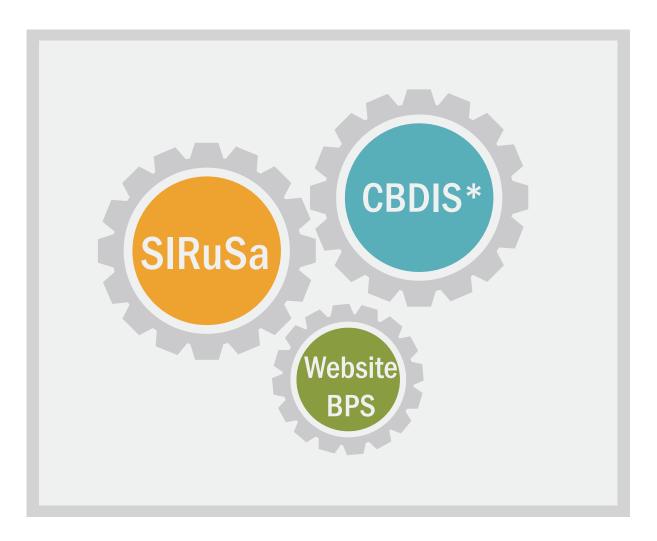
(2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

(4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

(5) : Masyarakat menyerahkan sinopsiske Pusat Rujukan Statistik



## Dukungan BPS Menuju Satu Data Indonesia



- ☐ Sistem informasi rujukan statistik (SIRuSa) berkolaborasi dengan CBDIS dan website BPS sebagai pendukung Satu Data.
- ☐ CBDIS telah diujicobakan di Kabupaten Kulonprogo

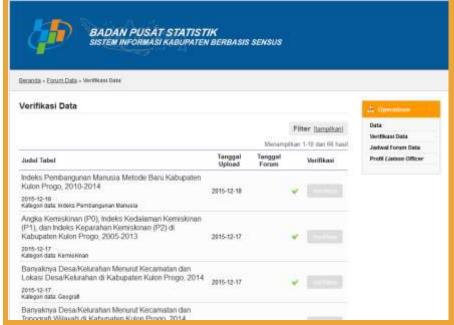
Catatan:

<sup>\*</sup>CBDIS: Census-based District Information System



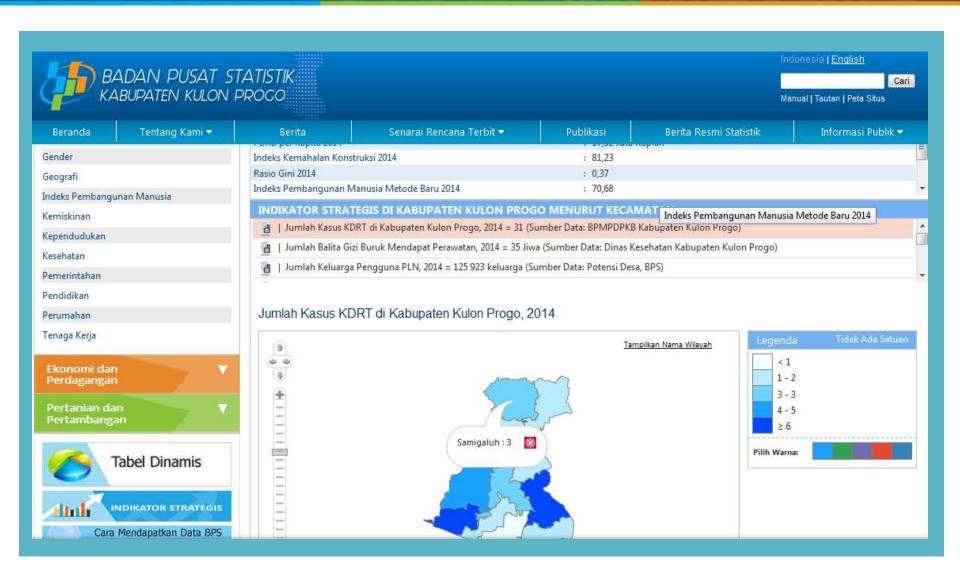
## Website CBDIS Kab. Kulon Progo<sub>(1)</sub>





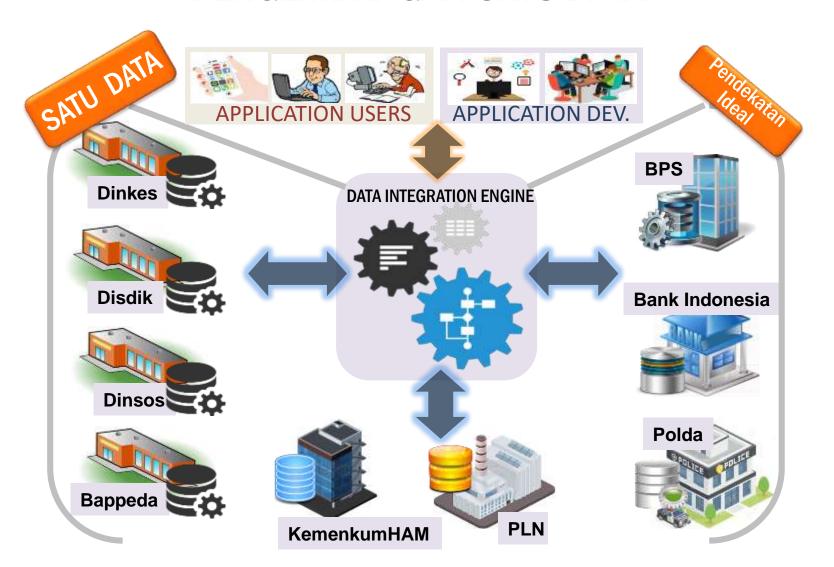


## Website CBDIS Kab. Kulon Progo<sub>(2)</sub>





#### PENGEMBANGAN SATU DATA



# 3

## Upaya Meningkatkan Kualitas Data



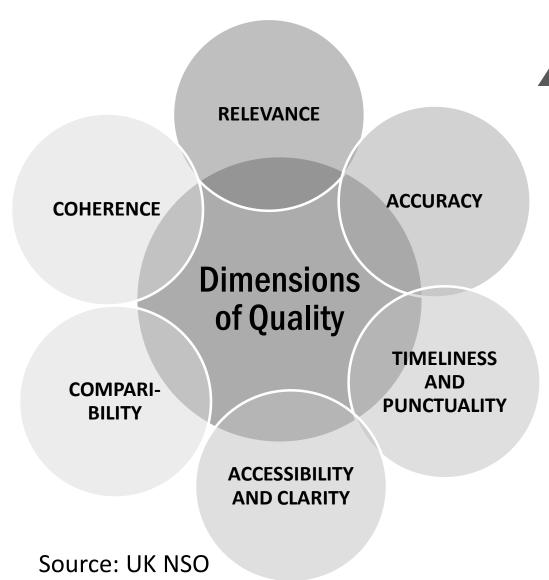
Upaya Meningkatkan Kualitas Data

## PENJAMINAN KUALITAS MUTU

(Quality Assurance Framework)







#### **DIMENSI DATA BERKUALITAS**

Good quality is not just producing accurate, timely, accessible, understandable and coherent data that satisfy users needs, but also

- ✓ addressing respondent concerns regarding reporting burden and confidentiality
- ✓ ensuring institutional environment is impartial, objective, comprising sound methodology and cost-effective procedures



### Upaya Meningkatkan Kualitas Data: Penguatan Metodologi



- ✓ Survei-survei Harga/ Inflasi/ Ekspor/Impor
- ✓ Sakernas
- ✓ Survei Hortikultura
- ✓ SPHPN





Contoh:

Susenas-SBH





- ✓ Data Bea Cukai/ K/L lain utk ekspor/impor
- ✓ Data-data Asosiasi dan K/L untuk menghitung Pertumbuhan Ekonomi
- ✓ uji coba persepsi konsumen.
- ✓ Data roaming untuk wisatawan



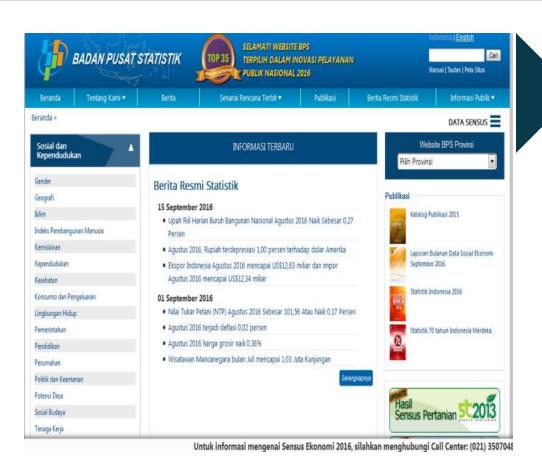
# 4

# Upaya Pelayanan Publik





#### PEMBENAHAN WEBSITE BPS



#### **Website BPS**

- TOP 35 INOVASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL 2016
- Mudah diakses:
  - Seluruh publikasi bisa di download gratis,
  - Seluruh data Excel gratis,
  - Metadata,
  - □ Microdata
- > Tabel Dinamis
- Segera rilis Website 4.0



## **INFOGRAFIS**



dari data yang RUMIT

ke Infografis





## PELAYANAN STATISTIK TERPADU

## SISTEM PELAYANAN STATISTIK TERPADU



#### Sekolah Tinggi Ilmu Statistik: Keberpihakan BPS untuk Mahasiswa dari Indonesia Timur Melalui PMDK (Penerimaan Mahasiswa Daerah Khusus) di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

- Mulai dilakukan sejak 2009
- ☐ Sekitar 10% dari total mahasiswa
- ☐ Sistem seleksi: jemput bola ke wilayah-wilayah *remote*
- ☐ Mahasiswa PMDK diberikan *treatment* khusus: matrikulasi, tutorial menjelang ujian serta konsultasi/pendampingan khusus
- □ Pada tahun 2016, selain jalur PMDK terdapat juga jalur seleksi reguler untuk mahasiswa Prodi D3 yang hanya dibuka untuk 5 provinsi wilayah Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT)

Jumlah Mahasiswa yang Diterima Melalui Jalur PMDK Berdasarkan Provinsi (Wilayah Timur & Lainnya), Tahun 2014-2016

Tahun	Papua	Papua Barat	Maluku	Maluku Utara	NTT	Lainnya	Jumlah
2014	9	10	0	0	2	31	52
2015	11	13	2	1	7	21	55
2016	5	5	6	5	39	27	87



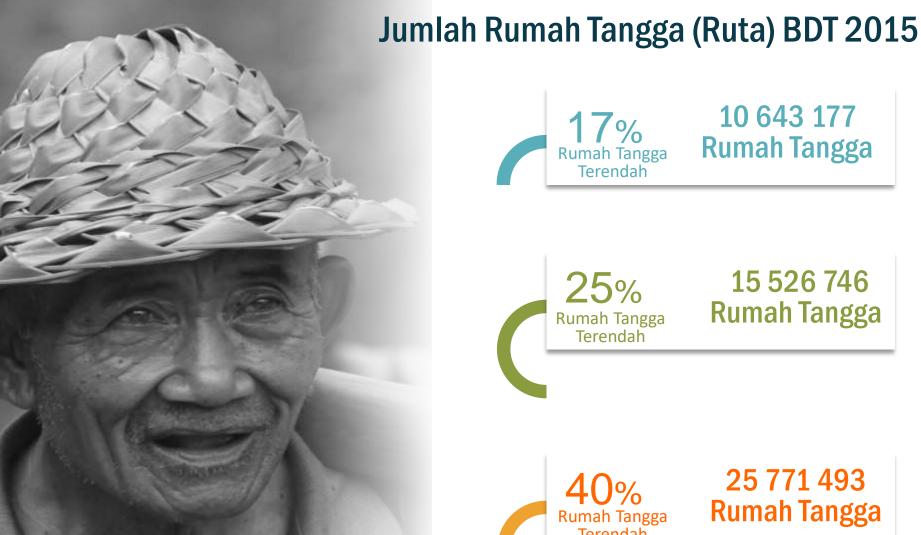
# **Tantangan BPS**

Mohon Dukungan dari Komisi XI DPR-RI





### PENGUMPULAN DATA INDIVIDU KEDEPAN?



17% Rumah Tangga Terendah

10 643 177 **Rumah Tangga** 

25% Rumah Tangga Terendah

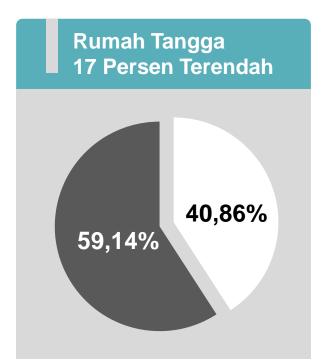
15 526 746 **Rumah Tangga** 

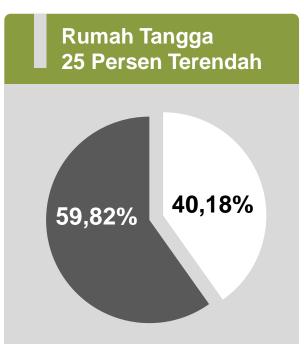
40% Rumah Tangga Terendah

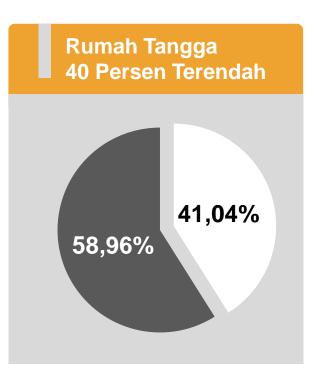
25 771 493 **Rumah Tangga** 



## Usaha Mikro Kecil (UMK)\*







■ Memiliki usaha sendiri/bersama
■ Tidak memiliki usaha sendiri/bersama

Kepemilikan Usaha	Rumah Tangga 17 Persen Terendah		Rumah Tangga 25 Persen Terendah		Rumah Tangga 40 Persen Terendah	
	Ruta	%	Ruta	%	Ruta	%
Memiliki usaha sendiri/bersama	4 348 615	40,86	6 238 597	40,18	10 577 583	41,04
Tidak memiliki usaha sendiri/ bersama	6 294 562	59,14	9 288 149	59,82	15 193 910	58,96
Total	10 643 177	100,00	15 526 746	100,00	25 771 493	100,00

<sup>\*</sup> Rumah Tangga dengan ART pengusaha Usaha Mikro Kecil



#### PENGUMPULAN DATA INDIVIDU KEDEPAN?



#### **Tugas BPS hanya MENGUMPULKAN DATA**

Tak terlibat penentuan penerima bantuan dan pencetakan kartu



#### Permintaan data ke TNP2K dan Kemensos BPS tidak berwenang untuk menyerahkan data mikro PBDT 2015 kepada pengguna.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 24/HUK/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa:

- ✓ PROSES PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERPADU melalui surat ditujukan kepada Menteri Sosial, dengan tembusan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K.
- ✓ Menteri Sosial mendisposisi kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial.
- ✓ Dirjen PFM memerintahkan Pokja Pengelola Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk melakukan penyiapan data.
- ✓ Data disampaikan kepada Dirjen PFM untuk disetujui.



#### Upaya Perbaikan Kualitas Data Pangan: Rekomendasi FMS

# Rekomendasi Forum Masyarakat Statistik (FMS):

Pemerintah dan BPS melakukan backcasting perbaikan statistik beras dan pangan lainnya selama 10 tahun atau 20 tahun ke belakang dengan berbagai dukungan data yang telah dilakukan antara lain melalui Sensus Pertanian

## Kegiatan yang telah Selesai Dilaksanakan:





## KSA adalah pilihan terbaik...

Metode	Keterangan		
Non-objective measurements (eye estimate, blok pengairan, penggunaan benih)	Ditengarai menghasilkan estimasi yang tidak akurat (overestimate)		
Remote sensing	Biaya mahal (kemungkinan tidak bisa diaplikasikan secara nasional)		
Penggunaan <i>drone</i>	Biaya mahal (kemungkinan tidak bisa diaplikasikan secara nasional)		
Kerangka Sampel Area (KSA)	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) merekomendasikan metode ini→ kerjasama dengan BPPT Saat ini dalam proses pengembangan untuk diaplikasikan secara nasional pada 2018		

# Terima Kasih

www.bps.go.id



Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710



bpshq@bps.go.id



(021) 3841195, 3842508, 3810291



Badan Pusat Statistik (Page)



(021) 3857046



@bps\_statistics